

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN  
LEMBAGA HIMPUNAN PEKON (LHP) DI PEKON PENENGAHAN  
KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT**

**Skripsi  
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN  
LEMBAGA HIMPUNAN PEKON (LHP) DI PEKON PENENGAHAN  
KECAMATAN KARYA PENGGAWA KABUPATEN PESISIR BARAT**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**IRPAN KURNIAWAN**  
**NPM : 1621020283**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Lembaga Himpunan Pekon (LHP) adalah sebutan lain dari Lembaga Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas sebagai lembaga penyelenggara Pemerintahan Pekon. Fungsi dan wewenang LHP diatur dalam UU No 32 tahun 2004 Pasal 209 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa. Pemilihan dan pengangkatan Aparatur LHP dilaksanakan secara Musyawarah dan Demokratis yang dilakukan oleh Kepala Keluarga (KK). Pemilihan lembaga himpunan pekon (LHP) yang Terjadi Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan hasil observasi di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, penulis menemukan fenomena bahwa tingkat penyelenggara pemilihan LHP yang demokratis dirasakan belum optimal.

Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Pelaksanaan pemilihan LHP di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?(2) Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan LHP di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan pemilihan LHP di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa kabupaten Pesisir Barat dan Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan LHP di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field Research*) dan data primer adapun yang menjadi populasi adalah warga Pekon penengahan kecamatan karya penggawa, calon LHP, dan Aparatur Pekon, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu Metode Wawancara dan Dokumentasi, setelah data terkumpul maka penulisan menganalisa data secara Kualitatif dan menggunakan pendekatan berpikir secara induktif. langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul.

Maka Telah Menghasilkan Berupa Kesimpulan: (1) Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Mekanisme Pemilihan Yang Ada Di Undang-Undang Desa Dengan Memperhatikan Persyaratan Calon Anggota LHP, Menjalankan Mekanisme Pemilihan Sesuai Dengan Aturan Yang Ada (Berlaku) Seperti Melakukan Pemilihan Secara Demokrasi Melalui Proses Musyawarah Untuk Mencapai Mufakat, Hanya Saja Pada Prakteknya Masih Terdapat Hal-Hal Yang Mengarah Pada Kecurangan Yang Terorganisir Yang Sudah Dianggap Masyarakat Hal Tersebut Adalah Suatu Yang Umum Dan Lumrah, Sehingga Tergerusnya Nilai-Nilai Demokrasi. (2) tidak bertentangan dengan Fiqh Siyasah, karena dalam pelaksanaannya dilakukan secara demokrasi yakni bermusyawarah (*syura*) untuk mencapai mufakat, seperti yang telah dicontohkan oleh Rosulullah SAW dan khulafaurrasyidin, Fiqh Siyasah aturan/peraturan yang dibuat itu pasti demi kemaslahatan umat, walaupun Pada prakteknya pemilihan tersebut diwarnai tindak kecurangan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Ketidada kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irpan Kurniawan  
NPM : 1621020283  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

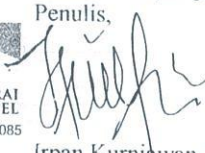
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat". Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, 29 Desember 2020

Penulis,



  
Irpan Kurniawan  
Npm : 1621020283





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260.*

**PERSETUJUAN**

Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan  
Lembaga Himpunan Pekon (LHP) Di Pekon Penengahan  
Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat  
Nama : Irpan Kurniawan  
NPM : 1621020283  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosyakan dan Dipertahankan Dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Dr. H. Jayusman, M.Ag**  
**NIP. 197411062000031002**

**Pembimbing II**

**Ahmad Sukandi, MHI**  
**NIP. 2014080919880710107**

**Ketua Jurusan,**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukaramo Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat” di susun oleh Irpan Kurniawan NPM. 1621020283 Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah), telah diUjikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas syaria’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal :

**Tim Dewan Penguji**

**Ketua : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I.**

**Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H.**

**Penguji Utama : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.**

**Penguji I : Dr. Hi. Jayusman, M.Ag.**

**Penguji II : Ahmad Sukandi, S.H.I.,M.H.I.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Khairuddin, M.H**  
NIP. 196210221993031002

## MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (38) .(QS. As Syura [42]: 38)*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil' alamin.* Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, yang menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku kasih dan tercinta Bapak Ahmad Bakrin dan Ibu Nurbaya, yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi dan selalu mendo'akan demi tercapainya cita-citaku.
2. Kakak Ku Iskandar Zulkarnain dan Adik Ku Koirul Zaza, selalu mendo'akan dan memberi dorongan demi keberhasilanku.
3. Sepupuku Neli Agustina, Syamsul Arifin, Faisol Ridwan, dan Paman Ku Zirwan Siddik yang selalu menghiburku dalam menyelesaikan skripsi ini,
4. Kakek ku Muhammad Satiri (Alm) dan Nenek ku Nurbaiti yang selalu menasehati dan memotivasiku,
5. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Irpan Kurniawan dilahirkan di Pekon Penengahan pada tanggal 15 April 1998, anak ke Dua dari 3 bersaudara dari pasangan Buah Hati Bapak Ahmad Bakrin dan Ibu yang bernama Nurbaya. Penulis mengawali pendidikan SDN Negeri 1 Penengahan Krui Pesisir Barat lulus Tahun 2010. Dilanjutkan Sekolah SMPN 1 Pesisir Tengah, Krui Pesisir Barat lulus Tahun 2013. Dilanjutkan Sekolah SMK Negeri 1 Krui Pesisir Barat lulus Tahun 2016.

Pada Tahun 2016 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Sterata 1 (satu) Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul : "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat".

Bandar Lampung, 29 Desember 2020

Irpan Kurniawan  
Npm :1621020183

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggenggam diri dan seluruh ciptaanya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulis skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

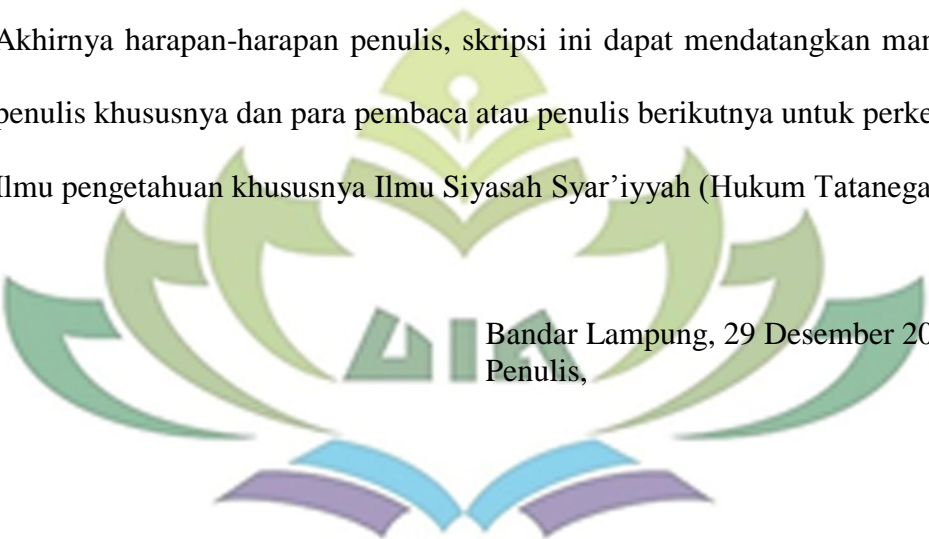
1. Bapak Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.SI. selaku ketua Jurusan Siyasah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag. selaku pembimbing I, dan Bapak Ahmad Sukandi, MHI. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Warga Masyarakat Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, adik, sahabat-sahabat terimakasih atas do'a dukungan, dan semangat. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Keluarga Persatuan ku (Ikatan Muli Mekhanai Penengahan La'ay) IMMPL yang telah membimbingku dan memotivasiku yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Sahabatku Raka, Ainul, Firman, Darman, Faisal, Ardian, Rido, dan Aldi Karung, yang selalu sudih mengawanku menyelesaikan skripsi.
10. Keluarga kecilku KKN (Indra, Andika, Marista, Herfina, Delvi, Destri, Umairroh, Mia, Adel, Anjani, Ririn, dan Aini yang selalu menyemangatiku)
11. Teman-temanku seperjuangan jurusan SiyasaH angkatan 2016 yang saling memotivasi khususnya kelas H
12. Seluruh dosen tercinta yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga bermanfaat bagiku dunia dan akhirat.
13. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2016 Andri Efendi, Eka Shaputra, Ilham Tri Yubsir, Eka Ishwanda, Ikbal Yusi, Yusri Romadhon, Muhammad Irfan Hidayat, dan yang lainnya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas semangat yang telah kalian berikan.



14. Untuk orang yang spesial Dinda Pratiwi, yang selalu ada di setiap proses sampai terselesaikannya skripsi ini, telah membantu dan mendo'akan perjalanan kuliah saya terimakasih atas semuanya.
15. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau penulis berikutnya untuk perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Siyash Syar'iyah (Hukum Tata negara).



Bandar Lampung, 29 Desember 2020  
Penulis,

Irpan Kurniawan  
NPM. 1621020283

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. ....	Pe
negasan Judul.....	1
B. ....	La
tar Belakang Masalah .....	2
C. ....	Id
entifikasi Dan Batasan Masalah .....	7
D. ....	Ru
musan Masalah .....	7
E. ....	Tu
juan Penelitian .....	8
F. ....	M
anfaat Penelitian .....	8
G. ....	Ka
jian Penlitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. ....	M
etode Penelitian .....	12
I. ....	Si
stematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pandangan Fiqh Siyasah	
1.....	Pe
ngertian Fiqh Siyasah.....	20
2.....	O
bjek Kajian Fiqh Siyasah .....	23
3.....	Fi
qh Siyasah Tanfidziyah.....	27
B. ....	Pe
milihan Anggota Legislatif dalam Fiqh Siyasah .....	46
C. ....	De
sa.....	49

D. ....	Le
mbaga Himpunan Pemekonan (LHP).....	52
1. Peran Lembaga Himpun Pemekonan (LHP).....	52
2. Fungsi Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP).....	53
3. Kewenangan Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP).....	54
4. Hak dan Kewajiban Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) ..	54

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. ....	G
ambaran Umum Pekon Penengahan Kecamatan Karya	
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	56
1.....	S
ejarah Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa	
Kabupaten Pesisir Barat.....	56
2.....	K
eadaan Geografis Pekon Penengahan Kecamatan Karya	
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	58
3.....	K
eadaan Demografi Pekon Penengahan Kecamatan Karya	
Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	59
B. ....	P
emilhan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) .....	61
C. ....	M
ekanisme Pelaksanaan Pemilihan LHP di Pekon Penengahan	
Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	72
D. ....	P
roses Pelaksanaan Pemilihan LHP di Pekon Penengahan	
Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	73

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Pelaksanaan Pemilihan LHP di Pekon Penengahan Kecamatan	
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.....	82
B. ....	T
injauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan LHP di	
Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten	
Pesisir Barat .....	87

### **BAB V PENUTUP**

A. ....	Kes
impulan.....	92
B. ....	Rek
omendasi.....	93

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 Blanko Konsultasi



Lampiran 2 Hasil Turnitin Skripsi  
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari  
Lampiran 4 Surat Pedoman Wawancara  
Lampiran 5 Surat Keterangan Wawancara  
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Adapun judul skripsi ini adalah "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpunan pekon (LHP) Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat". Hal-hal yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut;

#### 1. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 11

## 2. Pelaksanaan Pemilihan Lemabaga Himpunan Pekon (LHP)

Pelaksanaan Pemilihan dalam hal ini pemilihan Ketua Lembaga Himpunan Pekon (LHP) dalam mewujudkan demokrasi pekon di pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami maksud dari judul skripsi ini adalah berupaya untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan pemilihan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yang kemudian ditinjau dari Fiqh Siyasah.

### **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia yang menganut sistem demokrasi diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu prinsip berkeadilan dan keterbukaan menjadi penentu dalam membangun Indonesia. Sebagaimana cita-cita dalam bernegara adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kesadaran demokrasi telah menyentuh seluruh elemen masyarakat termasuk warga pekon Penengahan kecamatan Karya Penggawa kabupaten Pesisir Barat. Hadirnya undang-undang desa dan peraturan daerah tentang perangkat pekon membantu masyarakat dalam mengelola pemerintahan pekon. Kekuasaan dalam negara demokratis dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: kekuasaan untuk membuat undang-undang dilaksanakan oleh badan perwakilan rakyat. Sebagai badan legislatif, badan perwakilan rakyat dilarang untuk menjalankan undang-undang karena tugas untuk menjalankan undang-undang diserahkan kepada



badan eksekutif atau pemerintah. Sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban untuk mempertahankan idealitas undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyat serta menjatuhkan hukuman atas pelanggaran undang-undang baik yang dilakukan oleh badan legislatif maupun eksekutif.<sup>2</sup> Tujuan dari dibagi-baginya kekuasaan tersebut adalah agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan saja yang dapat berakibat pada pemerintahan yang otoriter sehingga dapat menghambat peran serta rakyat dalam menentukan suatu kebijakan.<sup>3</sup>

Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Lembaga Himpunan Pekon (LHP) selaku lembaga legislatif dalam pemerintahan pekon. LHP sebagai lembaga legislatif di pekon, fungsi legislasi yang dimilikinya tidak seperti fungsi legislasi pada DPR di tingkat pusat yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah undang-undang sendiri. Fungsi legislasi pada LHP dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Fungsi daripada LHP sebagaimana diatur dalam Pasal 209 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Gunawan A Tahuda, *Komisi Negara Independen*, (Yogyakarta: Genta Press, 2012), 52

<sup>3</sup>Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), 107

<sup>4</sup>Peraturan daerah kabupaten Lampung Barat nomor 11 tahun 2000 tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di pekon dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Lampung Barat,

Dalam menjalankan perannya untuk menetapkan peraturan pekon, keberadaan LHP sangat erat kaitannya dengan teori pemisahan kekuasaan yang dipopulerkan oleh Montesquieu.

1. Kekuasaan Legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Kekuasaan Eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
3. Kekuasaan Yudikatif, kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang.<sup>5</sup>

Kepala Pekon dalam menjalankan tugas dibantu oleh perangkat Pekon dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Pekon. Perangkat Pekon yakni sekretaris Pekon dan lembaga himpun pemekonan yang tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. LHP berfungsi menetapkan Peraturan desa bersama kepala Pekon menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan. Peran dan fungsi LHP dalam pembangunan yakni pembuatan perencanaan bersama pemerintahan Pekon lembaga yang mengawasi jalannya peraturan Pekon dan memberikan jalan bagi pemerintah Pekon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

LHP berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dimaksud dalam pasal 2 berfungsi menetapkan Peraturan Pekon bersama kepala Pekon. Lembaga himpun pemekonan bersama kepala Pekon harus benar-benar memperhatikan mitra kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan Pekon kemitraan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dimaksud adalah menjalankan tugas pembangunan masyarakat sesuai

---

<sup>5</sup>Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), 129.

dengan kapasitas, wewenang dan tugas masing-masing yang diharapkan kinerja keduanya berjalan secara sinergis cara yang baik dan tepat dalam meningkatkan sarana dan prasarana bagi kelancaran masyarakat setempat.<sup>6</sup>

Proses pemilihan menjadi penentu dalam kinerja suatu organisasi pemerintahan. Jika prosesnya dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan prinsip demokrasi, maka hasilnya akan sesuai dengan harapan.

Namun pada praktik Pelaksanaan Pemilihan LHP di pekan Penengahan kecamatan Karya Penggawa kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2019 masih terdapat hal-hal yang mengarah pada kecurangan yang terorganisir. Hal ini dapat ditunjukkan melalui beberapa keterangan yang diperoleh di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap bapak Hafizuddin salah satu anggota LHP proses pelaksanaan pemilihan LHP menerangkan bahwa ia di angkat menjadi anggota LHP sebagai kontrak politik karena telah memenangkan bapak Syaifuddin sebagai Ketua LHP.<sup>7</sup>

Pengangkatan kepemimpinan secara baik dan benar juga diatur dalam Hukum Islam yang dapat dikategorikan dalam muatan Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah masalah politik yang dikaji dari dalil-dalil yang terinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah<sup>8</sup>. Pada prinsipnya, menurut Islam setiap orang adalah pemimpin. Ini sejalan dengan fungsi dan peran manusia di muka bumi sebagai

---

<sup>6</sup>*Ibid*, 14

<sup>7</sup> Hafizuddin, Anggota LHP, *Wawancara*, pada tanggal 15 Januari 2020

<sup>8</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1994), 95



khalifahtullah yang diberi tugas untuk senantiasa mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Hal ini senada dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

*“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ Mereka berkata, ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau.’ Tuhan berfirman, ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’”(30). (Q.S. Al-Baqarah [2]:30)*

Dalil lain yang menjelaskan tentang konsep kepemimpinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadits Shahih Al-Bukhari nomor 6620.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكُنْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوْتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكْفَرُ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

*“Dari Abdurrahman ibn Samurah berkata: Nabi saw bersabda: Wahai Abdurrahman ibn Samurah, Janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika engkau diberi (jabatan) karena meminta, kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong, dan jika kamu melakukan sumpah, kemudian kamu melihat suatu yang lebih baik, bayarlah kaffarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik.” (GHR. Shahih Al-Bukhari No : 6620).<sup>9</sup>*

Islam adalah sebuah unit budaya yang khas dan mandiri. pemikiran politik mengkaji ihwal pelaksanaan kekuasaan, siapa yang layak melaksanakannya, serta seberapa besar kekuasaan yang bisa mereka miliki. Pemikiran politik berusaha menjelaskan konsep keadilan yang dijalankan

<sup>9</sup> Bukhori, Shohih Bukhari, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1987) Jus II, 674

dalam hubungan antar manusia, khususnya antara yang berkuasa dan yang dikuasai dan distribusi barang secara adil kepada masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yang disusun sebagai judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat".

### **C. Identifikasi Dan Batasan Masalah**

Penelitian ini terdiri dari bab 1 sampai bab 5 yang pembahasannya difokuskan pada Sebagai langkah awal untuk mendapat kan gambaran yang jelas mengenai "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat". yang pembahasan utamanya mengEnai penerapan Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, dan kemudian lebih lanjut akan dikaji melalui tinjauan *Fiqh Siyasah*.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah, maka Identifikasi dan batasan masalah penulis adalah "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) Di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat"

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dapat diambil, yakni;

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya yakni:

- a. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa. Selain hal tersebut penulis berharap dapat menambah wawasan bagi pembaca penelitian dan

penulis sendiri dengan harapan menjadi lebih baik, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Guna mendukung penelitian lebih lanjut sebagaimana yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas maka peneliti berusaha untuk melakukan penelaahan lebih awal terhadap sumber-sumber data pustaka yang ada, seperti buku, karya ilmiah, skripsi maupun jurnal antara lain :

1. penelitian yang dilakukan oleh Alex H. Situmorang dengan judul *"Hubungan Kemitraan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Himpunan Pemekon (LHP) dalam Pembangunan Fisik Desa"*<sup>10</sup>. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa Atau Lembaga Himpunan Pemekon (LHP) Dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan fisik Desa Sripendowo Kecamatan Sri Bhawono Kabupaten Lampung Timur. Tipe penelitiannya yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa Hubungan kemitraan Badan Permusyawaratan Desa Atau Lembaga

---

<sup>10</sup> Alex H. Situmorang *"Hubungan Kemitraan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau Lembaga Himpunan Pemekon (LHP) dalam Pembangunan Fisik Desa"* (Skripsi,Lampung: Universitas Lampung , 2014)

Himpunan Pemekon (LHP) dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan fisik Desa Sripendowo Kecamatan Sri Bhawono Kabupaten Lampung Timur bersifat semu. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu pertama, konfigurasi kekuasaan membuat kepala desa sebagai otoritas pemegang kekuasaan membuat perangkat lain tidak dapat ikut campur didalamnya. kedua, Konsolidasi antara Kepala Desa dengan BPD Sripendowo sudah terlaksana. Kepala Desa dan BPD/LHP mampu menyatukan pendapat mereka meskipun sering sekali terjadi perbedaan pendapat, namun hal tersebut tidak pernah memunculkan konflik diantara Kepala Desa dengan BPD. ketiga, Koordinasi antara Kepala Desa Sripendowo dengan BPD dalam pembangunan sudah terjalin meskipun BPD jarang hadir ke kantor sehingga menghambat proses koordinasi dengan kepala desa.

2. penelitian yang dilakukan oleh Yogi Saputra "*Peran Lembaga Himpunan Pemukiman (LHP) dalam Menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan*" oleh (2014).<sup>11</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran, faktor penghambat dan pendukung, dan pengaruh kinerja LHP dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Pekon Way Manak kecamatan Pugung. Tipe penelitiannya yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mencari gambaran yang sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peran LHP dalam penyelenggaraan

---

<sup>11</sup> Yogi Saputra "*Peran Badan Himpunan Pemukiman Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Dan Pembangunan*" ( Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2014)



pemerintahan dan pembangunan yang berada di Pekon Way Manak kecamatan Pugung kabupaten Tanggamus. Hasil penelitiannya secara garis besar bahwa peran LHP mempunyai.

pengaruh besar bagi masyarakat selain memberikan kesejahteraan kepada masyarakat juga memberikan pembelajaran untuk masyarakat dalam hal melakukan demokrasi yang ada di pekon. Faktor pendukung LHP dalam menjalankan peran dan tugas nya diantaranya terpenuhinya formasi aparat LHP, hanya forum komunikasi LHP, adanya dukungan untuk LHP, masyarakat mendukung segala kegiatan LHP dalam menjalankan fungsi legislasi. Faktor penghambatnya antara lain rendahnya kemampuan aparat LHP, kurangnya bimbingan ktekhnis dari penyelenggara dari pemerintah daerah, kurangnya koordinasi aparat pekon, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan LHP, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Fokus kajian karya ilmiah tersebut berbeda dengan kajian yang peneliti tulis. Jika dilihat dari judul karya ilmiah milik saudara Alex Situmorang terlihat sama dengan judul penelitian saya hanya penyebutan nama dan lokasinya saja yang berbeda. Akan tetapi jika ditelaah substansinya ada beberapa perbedaan karya ilmiah milik saudara Alex dan saya, yaitu : 1. Didalam penelitian Alex tidak dimunculkan bagaimana Proses Pelaksanaan LHP bagi pembangunan masyarakat sedangkan penelitian saya memperhatikan dan meneliti bagaimana Pelaksanaan pemilihan Lembaga Himpunan Pemekon. 2. Secara teori karya ilmiah Alex

mengambil teori-teori umum sedangkan penelitian saya secara eksplisit menggunakan teori-teori Islam sesuai dengan jurusan yang peneliti tekuni. Selanjutnya, mengenai karya ilmiah milik saudara Yogi juga memiliki beberapa perbedaan dengan karya ilmiah saya yaitu : 1. Penelitian saudara Yogi terfokus hanya dalam peran LHP saja sedangkan penelitian saya cenderung pada Pelaksanaan terhadap pemilihan lembaga Himpunan Pekon. 2. Peran LHP yang dikaji oleh saudara Yogi mencakup seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sedangkan penelitian saya lebih fokus pada pembangunan fisiknya mengenai pembangunan jalan berupa proyek rabat beton, gorong-gorong dan drainase.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah bagian yang tidak kalah penting adalah metode yang digunakan dalam penelitian. Dengan metode yang benar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat<sup>12</sup>. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa

---

<sup>12</sup>Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1986), 5

Kabupaten Pesisir Barat. Adapaun yang menjadi obyek adalah lingkungan, administrasi, warga dan struktur pekon.

## 2. Sifat Penelitian

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, disajikan secara deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.<sup>13</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana praktik pelaksanaan pemilihan LHP di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

## 3. Sumber data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu<sup>14</sup>.

### a. Data primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang mewakili. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari data administrasi pekon, Dokumentasi pemilihan dan hasil wawancara warga/masyarakat Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

<sup>13</sup>Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.58

<sup>14</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 57

### **b. Data sekunder**

Data diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data pendukung yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, serta catatan kuliah yang berkaitan dengan bahasan penelitian sebagai dasar paradigma antara teori yang relevan. Sumber lain dapat juga diperoleh dari beberapa jurnal yang mempunyai keterkaitan variable dengan judul penelitian<sup>15</sup>.

## **4. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>16</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah LHP Pekon Penengahan, aparatur dan warga Pekon Penengahan yang meliputi Tokoh Adat, Tokoh Agama , Dan Tokoh Masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena semua nasumber diambil sebagai sumber data penelitian, yaitu 3 orang Anggota LHP, 3

---

<sup>15</sup>Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 19

<sup>16</sup>Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), 102

orang dari pemerintah atau aparatur Pekon, dan 4 orang warga serta tokoh masyarakat.

#### b. Sampel

Yang dimaksud sampel adalah “sebagai populasi yang diselidiki.”<sup>15</sup> Proposal ini dalam menentukan sampel dalam menetapkan sampelnya menggunakan *purposive sampling*, artinya pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.<sup>17</sup> Adapun sample dalam penelitian ini Anggota LHP (3 orang), kepala desa dan aparatur Pekon (3 orang), dan warga serta tokoh masyarakat (4 orang).

### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

#### a. Interview/ Wawancara

Interview atau sering juga disebut dengan istilah wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>18</sup> Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada Aparatur pekon, Anggota LHP, Panitia Pembentukan LHP dan masyarakat Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

#### b. Dokumentasi

---

<sup>17</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Cet ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 64.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2013), 198



Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen- dokumen tertentu yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan foto.<sup>19</sup> Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan, buku induk pekon, buku-buku administrasi, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia yang terdapat di balai pekon yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

## **6. Metode Pengolahan Data**

### ***a. Editing***

Editing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan data penelitian dilapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

### ***b. Coding***

Coding adalah pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa penomoran atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.<sup>20</sup>

### ***c. Sistemating***

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, 188

<sup>20</sup>Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 63

Sistematis yaitu proses pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>21</sup>

#### **d. Metode Analisa Data**

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah tersebut. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa. Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>22</sup>

### **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 82

<sup>22</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat”

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian tentang “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat”

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. TINJAUAN FIQH SIYASAH

#### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>23</sup>

Al-qur'an menggunakan kata Fiqh dalam pengertian yang umum yaitu memahami masalah agama, memperlihatkan bahwa pada masa hidup Nabi saw, istilah Fiqh belum digunakan untuk pengertian hukum secara khusus tetapi mempunyai pengertian luas yang mencakup semua dimensi agama. Fiqh dipahami sebagai ilmu tentang agama yang mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan. Fiqh sebenarnya upaya manusiawi yang melibatkan proses penalaran baik dalam tataran teoritis maupun praktis, dalam memahami, menjabarkan, dan mengelaborasi hukum- hukum agama. Fiqh merupakan hasil pemikiran mujtahid terdahulu seperti Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, dan

---

<sup>23</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2001), 18



sebagainya yang dituangkan dalam ribuan kitab Fiqh, sehingga ribuan kitab Fiqh merupakan produk pemikiran mujtahid. Dan Fiqh hasil ijtihad, maka diperlukan perangkat tertentu yang mengatur pencapaian peroduk-produk Fiqh yang dikenal dengan istilah ushul Fiqh (*galle theory*).

Menurut Asaf A.A Fyzee dalam Muhyar Fanani bahwa istilah Fiqh sebutan lain dari hukum Islam harus berubah mengikuti perkembangan zaman sehingga Fiqh tidak boleh terpisah dari aspirasi masyarakat pada tempat dan waktu tertentu. Realitas sejarah Fiqh masih diwarnai oleh fenomena irelevansi dan dekadensi. Fiqh yang seharusnya cair dan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat dan berjalan dengan seiring aspirasi masyarakat justru menjadi beku karena adanya situasi yang tidak mendukung untuk berkembang situasi inilah yang disebut dengan tirani.<sup>24</sup>

Abdul Wahhab Khallaf mengatakan bahwa apabila Fiqh diidentifikasi sebagai ilmu, maka dinyatakan secara deskriptif. Ia merupakan wacana intelektual tentang penataan kehidupan masyarakat dengan menggunakan cara berpikir tertentu. Apabila diidentifikasi sebagai kumpulan hukum, maka dinyatakan sebagai preskriptif. Ia merupakan kumpulan hukum atau salah satu dimensi hukum Islam, yakni produk

---

<sup>24</sup>Muhyar Fanani, Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern, cet. I (Yogyakarta: LkiS, 2010), 290

pemikiran Fuqaha yang dijadikan salah satu patokan dalam penataan kehidupan manusia.<sup>25</sup>

Adapun kata siyasah merupakan akar kata dari mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan siyasah sebagai pemerintahan, politik, atau pembuat kebijaksanaan.<sup>26</sup> Dengan demikian, siyasah berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologi siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.<sup>27</sup>

Fiqh Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya<sup>28</sup> Fiqh Siyasah yaitu, sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan

<sup>25</sup>Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fikih*, cet. I (Bogor: Kencana, 2013), 8.

<sup>26</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Dar al-Anshar al-Qahirat, 1997), 4.

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* ( Jakarta: Prenada Media, 2014), 4

<sup>28</sup>Mujar Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga,2008), 11

kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendir.<sup>29</sup> Fiqh Siyasah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang masalahmasalah politik yang dikaji dari dalil-dalil yang terinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

## 2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Objek kajian *siyasah*

---

<sup>29</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13

<sup>30</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1994), 95

adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan *penadbirannya*, dengan mengingat persesuaian *penadbiran* itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syariah 'amah* yang tetap<sup>31</sup>.

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: 'Objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>32</sup> Maka secara garis besar objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.

Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang obyek kajian *fiqh siyasah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah :

- a. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara

---

<sup>31</sup>T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, (Yogyakarta : Matahari Masa, 1969), 3

<sup>32</sup> *Ibid*, 5

d. Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli lain.<sup>33</sup> Hasbi Ash Siddieqy, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturriyah Syar'iyah*
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
- 5) *Siyasah Idariyah Syar'iyah*
- 6) *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah*
- 7) *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*.<sup>34</sup>

Metode yang digunakan dalam membahas fiqh siyasah tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh siyasah juga menggunakan ilmu ushul fiqh dan qowaid fiqh. Dibandingkan dengan fiqh-fiqh yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam fiqh siyasah terasa lebih penting. Alasannya, masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an dan Hadist.<sup>35</sup>

Secara umum, dalam fiqh siyasah, digunakan metode- metode seperti :

---

<sup>33</sup>H.A. Djazuli, *'Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, (Jakarta: Kencana, 2003), 48

<sup>34</sup>*Ibid.*, 49

<sup>35</sup>*Ibid*, 30.



a. Al-Qiyas

Al- Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan Al-Qiyas, hukum dari sesuatu masalah dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

Penggunaan al-Qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan Al-Qiyas. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.<sup>36</sup>

b. Al-Mashalahah al-Mursalah.

Pada umumnya Al-Mashalahah al-Mursalah digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syari'at Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penarapan al-Mashlahah al-Mursalaah harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqih, dikenal dengan istilah istqra'. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan al-Mashlahah al-Mursalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.<sup>37</sup>

c. Sadd al-Dzariah dan Fath al- Dzari'ah

---

<sup>36</sup>Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 50

<sup>37</sup>*Ibid.*,51

Dalam fiqh siyasah sad al-Dzariah digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan untuk mencapai kemaslahatan<sup>38</sup>

d. Al-Adah

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam fiqh siyasah adalah al-‘adah. Adah ini ada dua macam, yaitu: al-adah ash shohihah dan al-‘addah al-fasidah. Al-‘adah ash shohihah yaitu adat yang tidak menyalahi Syara’, sedangkan al-‘adah al-fasida yaitu adat yang bertentangan dengan syara’<sup>39</sup>.

e. Al-Istihsan

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubunga itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: ‘melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil’<sup>40</sup>

f. Kaidah-kaidah Kulliyah Fiqhiyah.

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal. Fiqh Siyasah. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), 41

<sup>39</sup> *Ibid.*, 42

<sup>40</sup> *Ibid.* 43

<sup>41</sup> *Ibid.*, 47

### 3. Fiqh Siyasah *Tanfizziyah*

Kekuasaan eksekutif (*Al-Sulḥah Al-Tanfizziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/'amir*,<sup>42</sup> dan *wizarah/wazir*.

#### a) Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. Menurut *Kamus Munawwir*, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*.<sup>42</sup>

Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. al-Qur'an sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan dalam QS. Al-anbiya'/21: 73.

Secara harfiah arti *imam* adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. *Imamah* menurut doktrin Syi'ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga

---

<sup>42</sup>Nurrohman, M.A, *Konsef imamah* (Bandung: Al-Kasyaf, 2007), 17

mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.<sup>43</sup>

Di sinilah awal munculnya benih-benih perbedaan yang menjadi dua kelompok besar yaitu Sunni dan Syi'ah. Kelompok Sunni percaya bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh mereka yang dipilih. Sedang Syi'ah percaya secara definitif harus terdiri dari 12 orang keturunan Rasulullah saw. Ali bin Abi Thalib yang menjabat sekitar 17 Maret 599 M-28 Februari 661 H adalah khalifah yang keempat dan terakhir bagi kelompok sunni, tetapi yang pertama bagi Syi'ah. Syi'ah sekarang ini, khususnya aliran *isna asy'ariyyah* banyak berkembang di Iran, Iraq dan Lebanon.

Setelah Imam yang kedua belas, konsep kepemimpinan Syi'ah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga muncul istilah Wilayat Faqih yang diderivasi oleh Imam Khomeini sehingga menghasilkan revolusi 1979 di Iran. Syi'ah 12 berpendapat bahwa setelah ghaibnya imam mereka yang kedua belas, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sarjana, mujtahid, dan Ayatullah sehingga sang imam muncul kembali.

*Imamah* sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan

---

<sup>43</sup>Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117

fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi dalam kitabnya *Al- Imamah mauḍu'atu li khilafah al-nubuwwah fi hisarah al-din wasiyyah al-dunya*, bahwa pemilihan imam dilakukan dengan ijma' (konsensus) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang berhak memilih. Menurutnya pelembagaan *imamah* dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal. Alasannya firman Allah swt, QS. Al-Nisa (4): 59.

Sedangkan pemilihan pemimpin sebagai kekuasaan kepala negara hendaklah melalui jalur khusus yakni:

- a. Pemilihan oleh (para) pemilih, baik dengan sistem perwakilan melalui lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* (semacam MPR) maupun *ahl al-Syura* atau tim formatur kecil. Cara ini disebut dengan sistem kontrak sosial, yang melahirkan kewajiban dan hak kepala Negara disatu pihak serta kewajiban dan hak rakyat di pihak lain. Teori al-Mawardi ini jelas bertentangan dengan pandangan Syi'ah yang menyatakan bahwa jabatan imam ditetapkan atas dasar nass (penetapan oleh Tuhan dan Nabi) atau penunjukan langsung oleh imam sebelumnya dari keluarga *ahl al-bait*. Pemilihan imam dipandang al-Mawardi sebagai kewajiban sosial atau bersama (*fadhu kifayah*), seperti mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim. Konsep membentuk lembaga imamah dan pemilihan imam menyerupai konsep 'kontrak' yang melibatkan dua

pihak yaitu imam (*ahl- imamah*) dan rakyat atau pemilih (*ahl al-ikhtiyar*), atau *ahl al-hall wa al-'aqd* (orang yang mengurai atau mengikat/lembaga pemilih). Menurutnya pemilih atau lembaga pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang mempunyai rasa (*'adalah*), mempunyai pengetahuan cukup tentang calon yang akan dipilih dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk jabatannya, serta sehat pikiran dan kebijakan (kearifan), sehingga mampu memilih kepentingan orang banyak. Disamping itu masalah pemilihan imam, *ahl al-hall wa al-'aqd* juga harus mempertimbangkan, kemungkinan calon yang mereka pilih memperoleh persetujuan sebagian besar rakyat. Setelah *ahl ikhtiyar* memperoleh keputusan mengenai calon imam dan ia wajib menerima kedudukan itu, maka menjadi tugas dan kewajiban rakyat untuk menyampaikan *bay'ah* dan mematuhi. Singkatnya fungsi *ahl-akhtiyar* adalah mengidentifikasi orang yang akan di angkat sebagai imam.<sup>44</sup>

- b. Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang disebut suksesi yang didasarkan pada kepemimpinan Umar bi al-Khattab dari wasiatnya Abu Bakar. Namun dalam pandangan al-Mawardi kepala Negara tidak kebal dari pemecatan dan tidak suci.<sup>45</sup>

Al-Mawardi seperti dikutip oleh Dedi Supriyadi menjelaskan, bahwa boleh suksesi tanpa pertimbangan dari *ahlu al-ikhtiyar*, asalkan

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, 113.

<sup>45</sup>*Ibid.*, 113.



calon penggantinya bukan ayahnya atau anak laki-lakinya. Dalam hal ini disebutkan tiga pendapat, yakni:

1. Pertama bahwa seorang imam harus berkonsultasi dengan *ahl al-ikhtiyar*, meskipun adalah ayah atau anak laki-lakinya.
2. Kedua, membatasi konsultasi pada kasus dimana sang calon adalah putra imam.
3. Ketiga, tidak mengharuskan imam untuk berkonsultasi dalam kasus kedua tersebut.<sup>46</sup>

Menurut al-Mawardi, seorang imam atau calon imam harus memenuhi/memiliki tujuh persyaratan:

1. Rasa keadilan (*'adalah*);
2. Pengetahuan (*'ilm*);
3. Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan;
4. Sehat tubuh tidak cacat, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas;
5. Berwawasan luas;
6. Punya keberanian untuk melindungi wilayah (otoriti) Islam dan melaksanakan jihad;
7. Punya garis keturunan dari Quraisy.<sup>47</sup>

Syarat terakhir tidak dipandang sebagai suatu keharusan oleh pemikir-pemikir Sunni setelahnya dan penulis-penulis modern, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan

---

<sup>46</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasa: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 91

<sup>47</sup> *Ibid.*, 92

persamaan hak sesama muslim tanpa memandang asal-usul atau keturunan. Bahkan Nabi Muhammad saw sendiri diakui oleh kaum Sunni tidak pernah menyatakan dengan tegas siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin umat. Sementara dua penyebab gugurnya kontrak antara imam dan rakyat meskipun masih menjabat, menurut al-Mawardi adalah jika imam berlaku tidak adil dan imam mengalami cacat fisik. Jika hal itu terjadi maka harus dilakukan pemilihan imam baru dengan kontrak yang baru pula.<sup>48</sup>

Doktrin *al-Asy'ari* membolehkan adanya dua imam pada waktu bersamaan asal wilayah kekuasaannya terpisah jauh. Namun al-Mawardi dengan tegas menolak pendapat ini, didasarkan pada argument keagamaan, sebab bay'ah hanya bisa diberikan kepada satu orang pada waktu yang sama. Jika kemudian dilakukan bay'ah terhadap orang lain, maka kontrak yang kedua menjadi batal, sebagaimana berlaku dalam pernikahan. Ketidaksetujuan ini didasarkan pertimbangan politik, dimana masa itu Abbasiyah menghadapi tantangan dari dinasti Fatimiyah yang berkuasa di yang bermazhab *Syi'ah Ismailiyah*.

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah:<sup>49</sup>

1. Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal;
2. Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, 92

<sup>49</sup>*Ibid.*, 95

- melerai perteng- karan antara dua kelompok yang bertikai;
3. Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya;
  4. Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan;
  5. Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh;
  6. Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau *ahl al-zimmah* (non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)
  7. Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut syari'ah maupun yang wajib menurut ijtihad.
  8. Mengatur kekayaan Negara yang ada di *bait al-Mal*, dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional).

Dalam kekuasaan imam ada empat macam (lembaga) kekuasaan Negara dengan tugas masing-masing berbeda, yakni:<sup>50</sup>

1. Lembaga yang kekuasannya umum dalam tugas-tugas umum/para menteri (*wazir*), tugas mereka mewakili imam dalam semua urusan tanpa pengecualian.
2. Lembaga yang kekuasannya umum dalam tugas-tugas khusus/para

---

<sup>50</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep* (Cet. 1; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), 91.

pemimpin wilayah (*amir*).

3. Lembaga yang kekuasaannya khusus seperti para hakim kepala (*qadi al- qudat*), pemimpin tentara, penjaga keamanan wilayah perbatasan, direktorat, penanggungjawab pajak dan penanggungjawab zakat. Tugas mereka masing- masing terbatas pada investigasi khusus dalam semua tugas.
4. Lembaga yang kekuasaannya khusus dalam tugas-tugas khusus, seperti hakim daerah, pengawas pajak daerah dan komandan militer daerah.

#### **b) Konsep *Khilafah***

*Khilafah* dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah SAW. dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *Khalifah* ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimin*. Khalifah dan khilafah itu hanya terwujud bila :

1. Adanya seorang *Khalifah* saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. *Khalifah* tersebut harus diangkat dengan sistem Syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan)..
2. Adanya wilayah yang menjadi tanah air (*waḍan*) yang dikuasai

penuh oleh umat Islam.<sup>51</sup>

Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh. Atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari Syariat Islam yang bersumberkan dan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw. seperti undang-undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya.

A. Adanya masyarakat Muslim yang mayoritasnya mendukung, berbai'ah dan tunduk pada *Khalifah* (pemimpin tertinggi) dan *Khilafah* (sistem pemerintahan Islam).

B. *Khilafah* yang dibangun bukan berdasarkan kepentingan sekeping bumi atau tanah air tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak pula berdasarkan kepentingan pribadi *Khalifah* atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah (Islam) di atas bumi.<sup>52</sup>

Sebab itu Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam Al-Sulṭaniyyah* mengemukakan, bahwa objek *imamah* (kepemimpinan umat Islam) itu ialah untuk meneruskan *khilafah nubuwwah* (kepemimpinan Nabi Saw) dalam menjaga agama Islam dan mengatur semua urusan duniawi umat Islam.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 138

<sup>52</sup> *Ibid.*, 139

<sup>53</sup> Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep* (Cet. 1; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001), 97

### 1) Syarat-syarat sebagai *Khalifah*

Karena *Khalifah* itu adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan hanya pemimpin kelompok atau jamaah umat Islam tertentu, dan bertanggung jawab atas tegaknya ajaran Islam dan urusan duniawi umat Islam, maka para ulama, baik salaf (generasi awal Islam) maupun khalaf (generasi setelahnya), telah menyepakati bahwa seorang *Khalifah* itu harus memiliki syarat atau kriteria yang sangat ketat. Syarat atau kriteria yang mereka jelaskan itu berdasarkan petunjuk al-Qur'an, Sunnah Rasul Saw. dan juga praktek sebagian Sahabat, khususnya *Khulafaur al-rasyidin* setelah Rasul saw, yakni Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali, R.a.<sup>54</sup>

Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Addud al-Syanqiti, paling tidak ada sepuluh syarat atau kriteria yang harus terpenuhi oleh seorang *Khalifah*:

5. Muslim. Tidak sah jika ia kafir, munafik atau diragukan kebersihan akidahnya.
6. Laki-Laki. Tidak sah jika ia perempuan karena Rasul Saw bersabda: '*Lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra-atun* (Tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin).'
7. Merdeka. Tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 137.



memimpin dirinya, apalagi memimpin orang lain.

8. Dewasa. Tidak sah jika anak-anak, karena anak-anak itu belum mampu memahami dan memenej permasalahan.
9. Sampai ke derajat Mujtahid. Karena orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan (taklid), tidak sah kepemimpinannya seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Bar bahwa telah ada ijmak (konsensus) ulama bahwa tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai ke derajat Mujtahid tentang Islam.
10. Adil. Tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak (sah) bagi orang-orang yang zalim.
11. Profesional (amanah dan kuat). *Khilafah* itu bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyari'atkan seperti menegakkan Agama Allah di atas muka bumi, menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang dizalimi, memakmurkan bumi, memerangi kaum kafir, khususnya yang memerangi umat Islam dan berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tersebut tidak boleh diangkat menjadi Khalifah. Sebab itu, Imam Ibnu Badran ra., bahwa pemimpin-pemimpin Muslim di negeri-negeri Islam yang menerapkan

sistem kafir atau musyrik, tidaklah dianggap sebagai pemimpin umat Islam karena mereka tidak mampu memerangi musuh dan tidak pula mampu menegakkan syar'ait Islam dan bahkan tidak mampu melindungi orang-orang yang dizalimi dan seterusnya, kendatipun mereka secara formal memegang kendali kekuasaan seperti raja atau presiden. Lalu Ibnu Badran menjelaskan, bahwa mana mungkin orang-orang seperti itu menjadi Khalifah, sedangkan mereka dalam tekanan Taghut (Sistem Jahiliyah) dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan para pemimpin gerakan dakwah yang ada sekarang hanya sebatas pemimpin kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah umat Islam, tidak sebagai pemimpin tertinggi umat Islam yang mengharuskan taat *fi al-mansyat wa al-makrah* dalam situasi mudah dan situasi sulit), kendati digelar dengan *Khalifah*.

12. Sehat penglihatan, pendengaran dan lidahnya dan tidak lemah fisiknya. Orang yang cacat fisik atau lemah fisik tidak sah kepemimpinannya, karena bagaimana mungkin orang seperti itu mampu menjalankan tugas besar untuk kemaslahatan agama dan umatnya? Untuk dirinya saja memerlukan bantuan orang lain.
13. Pemberani. Orang-orang pengecut tidak sah jadi *Khalifah*. Bagaimana mungkin orang pengecut itu memiliki rasa

tanggung jawab terhadap agama Allah dan urusan Islam dan umat Islam. Ini yang dijelaskan Umar Ibnul Khattab saat beliau berhaji: ‘Dulu aku adalah pengembala onta bagi Khattab (ayahnya) di Dhajnan. Jika aku lambat, aku dipukuli, ia berkata: Anda telah menelantarkan (onta-onta) itu. Jika aku tergesa-gesa, ia pukul aku dan berkata: Anda tidak menjaganya dengan baik. Sekarang aku telah bebas merdeka di pagi dan di sore hari. Tidak ada lagi seorangpun yang aku takuti selain Allah.’

14. Dari suku Quraisy, yakni dari puak Fihir Bin Malik, Bin Nadhir, Bin Kinanah, Bin Khuzai’ah. Para ulama sepakat, syarat ini hanya berlaku jika memenuhi syarat-syarat sebelumnya. Jika tidak terpenuhi, maka siapapun di antara umat ini yang memenuhi persyaratan, maka ia adalah yang paling berhak menjadi *Khalifah*.<sup>55</sup>

## 2) Sistem Pemilihan *Khalifah*

Dalam sejarah umat Islam, khususnya sejak masa *Khulafau al-rasyidin* sepeninggalan sistem Nubuawah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw sampai jatuhnya *Khilafah* Utsmaniyah di bawah kepemimpinan *Khalifah* Abdul Hamid II yang berpusat di Istambul, Turki tahun 1924, maka terdapat tiga

---

<sup>55</sup>Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syariah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 64.

sistem pemilihan *Khalifah*.<sup>56</sup> *Pertama*, dengan sistem *Wilayat al-'Ahd* (penunjukan *Khalifah* sebelumnya), seperti yang terjadi pada Umar Ibnul Khatab yang ditunjuk oleh Abu Bakar.

*Kedua*, dengan sistem syura, sebagaimana yang terjadi pada *Khalifah* Usman dan Ali. Mereka dipilih dan diangkat oleh Majelis Syura. Sedangkan anggota Majelis Syura itu haruslah orang-orang yang sholeh, faqih, wara' (menjaga diri dari syubhat) dan berbagai sifat mulia lainnya. Oleh sebab itu, pemilihan *Khalifah* itu tidak dibenarkan dengan cara demokrasi yang memberikan hak suara yang sama antara seorang ulama dan orang jahil, yang saleh dengan penjahat dan seterusnya.<sup>57</sup> Baik sistem pertama maupun sistem kedua, persyaratan seorang *Khalifah* haruslah terpenuhi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian, setelah sang *Khalifah* terpilih, umat wajib berbai'ah kepadanya. Ketiga, dengan sistem kudeta (kekuatan) atau warisan, seperti yang terjadi pada sebagian *Khalifah* di zaman Umawiyah dan Abbasiyah. Sistem ini jelas tidak sah karena bertentangan dengan banyak dalil Syar'i dan praktek *Khulafau al-rasyidin*.

### 3) Tugas dan Kewajiban *Khalifah*

Pada dasarnya tugas dan kewajiban *Khalifah* itu sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, 347

<sup>57</sup>*Ibid.*, 63.

kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau syari'ah dan manajemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (*rahmatan li al-'alamin*). Secara umum, tugas *Khalifah* itu ialah:

1. *Tamkin Dinillah* (menegakkan Agama Allah) yang telah diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan.
2. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan Agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
3. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik (QS.An Nur: 55).
4. Menerapkan undang-undang yang ada dalam al-Qur'an, termasuk Sunnah Rasul saw., dengan Hak dan adil, kendati terhadap diri, keluarga dan orang-orang terdekat sekalipun (QS.

An-Nisa: 135, Al-Maidah: 8 & 48, Shad: 22 & 26)<sup>58</sup>

## B. Pemilihan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Siyasah

Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati. Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt dalam Surah an-Nisa' ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



*“Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(59).(Q.S An-Nisa' [4]: 59)*

Jika ditinjau dari sumber pembentukannya, maka dikenal dua jenis siyasah yaitu siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah. Siyasah syar'iyah yaitu siyasah dalam proses penyusunannya memperlihatkan norma dan etika agama, sedang siyasah wadhiyyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak manusia sendiri serta lingkungannya. Sedang siyasah wadh'iyah hanya memiliki sumber dari bawah saja yaitu manusia sendiri dan lingkungannya.

Setiap produk siyasah syariyah pasti Islami, sedangkan siyasah wadh'iyah boleh jadi bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam proses penyusunannya tidak lebih dulu merujuk pada ajaran dan norma

<sup>58</sup> Ibid., 67



agama. Namun demikian, tidak berarti siyasah wadh'iyyah tidak Islami. Siyasah wadh'iyyah dapat bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai siyasah syar'iyah apabila memenuhi enam macam kriteria, yaitu:

- 1) Isinya sesuai atau sejalan dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.
- 2) Meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan.
- 3) Tidak memberatkan masyarakat.
- 4) Menegakkan keadilan.
- 5) Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan.
- 6) Prosedur pembentukkannya melalui musyawarah.

Fiqh siyasah dipandang sebagai proses yang tidak pernah selesai karena senantiasa terlibat dengan pergumulan sosial dan budaya dan pemecahan atas berbagai persoalan lebih bersifat kontekstual, sehingga gejala Fiqh siyasah menampilkan diri dalam sosok yang beragam sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Namun demikian, Fiqh siyasah tidak serta merta menjadi nisbi (relatif) karena memiliki kemutlakkan. Paling tidak, terkait kemestian untuk selalu mewujudkan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah.

Dalam bahasa Arab, Pemilihan Umum disebut dengan al- intikhabah al- ammah. Intikhabah merupakan jama' muannas salim yang artinya

memilih<sup>59</sup>. Sedangkan menurut istilah adalah dikembalikannya hak memilih kepada umat atau rakyat, menuntut hak-haknya, dan membelanya dari hal-hal yang merugikan mereka. Dalam sejarahnya, istilah Pemilu dalam Islam memang tidak terlalu dikenal. Pemilu muncul di masa-masa kontermporer ini dimana telah terbentuk Negara-negara yang banyak bercorak demokrasi bagi Negara mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Namun sejak zaman Khalifah yang empat (Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali) yang oleh Mahomed Ullah disebut periode Republik.<sup>60</sup>

Bibit-bibitnya telah muncul walaupun dalam bentuknya yang sederhana ini sebagaimana terlihat dalam proses pengangkatan Sahabat Nabi, Abu Bakar di Tsaqifah Bani Sa'idah sebagai Khalifah pertama melalui pemilihan umum yang pada saat itu berbentuk ijm' atau kesepakatan dari para sahabat. Dilihat dari bentuknya, Pemilu dapat disejajarkan dengan Baiat yang menurut Ibn Khaldun adalah perjanjian atas dasar kesetiaan. Orang yang berbaiat menerima seseorang yang dibaiai menjadi amir atau pemimpin dalam melaksanakan urusan kaum muslimin. Informasi dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan baiat ini adalah surah Al-Fath ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ أَجْرٍ أَعْظِيمًا ۖ

*“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar*

<sup>59</sup>H.A. Djazuli, 'Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah', (Jakarta: Kencana, 2003), 48

<sup>60</sup>Mahomed Ullah Ibn S. Jung, The Administration Of Justice In Islam : An Introduction to The Muslim Conception of The State, (New, Delhi: Kitab Bhavan, 1990) , 10

*janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar”.(10) (Q.S Al-Fath [48]: 10)*

Dari konteks yang lebih luas, baiat dapat dipahami sebagai konsep perjanjian yang melibatkan dua kelompok yaitu pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain, Pemilu sebagaimana terjadi dalam situasi modern sekarang merupakan perluasan dari istilah baiat dalam konteks Fiqh Siyasah karena sama-sama mempresentasikan serah terima (pemindahan) kekuasaan dari otoritas public kepada imam dan sumpah (janji setia) imam untuk menjalankan hukum demi memenuhi harapan publik.

### C. Desa

#### 1. Pengertian Desa

Membicarakan tentang “Desa” di Indonesia, maka sekurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian Desa secara *sosiologis*, yaitu yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif *homogeny*, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian *sosiologis* tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov, 2013),1

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang di sediakan alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>62</sup>

Ketiga, pengertian secara politik, dimana “Desa” sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara.<sup>63</sup>

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan UUD 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat 7 yang menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggara pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang. Hal ini berarti, bahwa pasal 18 ayat 7 UUD 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Pasal 4, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan Desa bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan penjelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, 2

<sup>63</sup> *Ibid.*, 3

sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.

- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan dan aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan Nasional.

Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.<sup>64</sup>

Konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom) dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya desa disebut memiliki otonom asli, yang berbeda dengan daerah otonom lainnya seperti Kabupaten,

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keresidenan, dan Provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintah pusat atau pemerintah Nasional.<sup>65</sup>

#### **D. Lembaga Himpunan Pekon ( LHP)**

##### **1. Peran LHP**

Pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dengan pertimbangan LHP. Dalam pemerintahan Desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada LHP. Kedudukan LHP di desa adalah sebagai mitra kerja Kepala Desa. Pertanggungjawaban Kepala Desa ini yang selanjutnya menjadi tugas dan wewenang LHP. Dalam melaksanakan tugasnya LHP mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun peran dari LHP adalah sebagai berikut:

##### **1) Menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa.**

LHP bersama Kepala Pekon membahas rancangan peraturan Desa yang akan di tetapkan, kepala Desa tidak dapat begitu saja mengambil sebuah kebijakan tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan terlebih dahulu dari LHP.

##### **2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>66</sup>**

LHP berperan menggali, menghimpun dan merumuskan

---

<sup>65</sup> *Ibid.* 2

<sup>66</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2015



aspirasi masyarakat, dan kemudian menyalurkan aspirasi tersebut. Aspirasi dari masyarakat bisa didapat oleh LHP dengan melakukan musyawarah dengan masyarakat Pekon. Aspirasi masyarakat bisa diberikan kapan saja kepada anggota LHP, setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya, maka aspirasi itu di tampung dan di olah oleh anggota LHP dan kemudian dibahas bersama-sama dengan pemerintahan Desa.

## 2. Fungsi LHP

Lembaga Himpunan Pekon berfungsi sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Pekon.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Pekon.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, LHP mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

e. Menyusun tata tertib LHP.<sup>67</sup>

### 3. Kewenangan LHP

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, LHP mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyusun tata tertib LHP.<sup>68</sup>

### 4. Hak dan kewajiban LHP

BPD mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Meminta keterangan Kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat.<sup>69</sup>

Anggota BPD mempunyai hak sebagai berikut:

- 1) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- 2) Mengajukan pertanyaan.
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat.
- 4) Memilih dan dipilih.

---

<sup>67</sup> Undang-Undang RI No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016, *tentang desa*

<sup>68</sup> Undang – Undang RI No 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016, *tentang Desa*

<sup>69</sup> *Ibid.*, 15

### 5) Memperoleh tunjangan<sup>70</sup>

Sedangkan anggota BPD mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa (membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menetapkan calon Kepala Desa yang berhak di pilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota untuk di sahkan menjadi Kepala Desa terpilih).
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatanmasyaraka.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, 19

<sup>71</sup> *Ibid.*, 19

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. *Al-Qur'an*

### 2. Buku

A. Djazuli, Fiqh Siyasah, 2004, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana

Abdul Muin Salim, 2002, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Abdul Wahhab Khallaf, 1997, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Dar al-Anshar al-Qahirat

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-6

Burhan Bungin, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset

Chalik, Abdul, 2017, *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Cik Hasan Basri, 2013, *Model Penelitian Fikih*, Bogor: Kencana, cet. I

Dede Rosyada, 1994, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III* Jakarta: Rajawali Grafindo Persada

Dede Rosyada, 1994, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta,

Departemen Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: PT Miza Buana Kreativa

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet Ke-4,

Fanani Muhyar, 2010 Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern, cet. I, Yogyakarta: LkiS,

Farahdiba Rahma Bactiar, 2014, 'Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi' dimuat pada Jurnal Politik Profetik, Vol. 3, No.1

Gunawan A Tahuda, 2012, *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta: Genta Press

H.A. Djazuli, 2003, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana

- Iqbal Hasan, 2004, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- J.Suyuti Pulungan, 1994, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Rajawali
- Kaelan M.S., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* Yogyakarta: Paradigma
- Koenjaraningrat, 1986, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* , Jakarta: Gramedia,
- Mahomed Ullah Ibn S. Jung, 1990, *The Administration Of Justice In Islam : An Introduction to The Muslim Conception of The State*, New, Delhi: Kitab Bhavan
- Moh. Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-9
- Moh. Pabundu Tika, 2006, *Metodologi Riseach Bisnis* Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Muhammad Iqbal, 2007, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Muhyar Fanani, 2010, *Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LkiS, cet. I
- Mujar Ibnu dan Khamami Zada, 2008, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Jakarta: Erlangga
- Sastroatmodjo, Sudijono, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press
- Schultz, D. P, 1986, *Psychological and Work Today: An introduction to Industrial and Organizational Psychology*, New Jersey: Prentice Hall
- Sedarmayanti dan Hidayat Syarifudin, 2002, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Manjar Maju
- Soejono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Grasindo
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rieneka Cipta
- Susiadi, 2015, *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung
- Sutrisno, 2009, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* Bandung: Fakultas Teknologi UGM
- T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1969, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariah Islam*, Yogyakarta : Matahari Masa
- Wahbah al-Zuhayli, 2001 *Ushul al-Fiqh al-islami*, Damaskus: Daral-Fikr
- Yusa Djuyandi, 2017, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta:Rajawali Pers

### 3. Peraturan

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2013 tentang Badan HIPPUN Pemekonan)  
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Pekon

### 4. Online

<https://pramudyarum.wordpress.com/2013/02/09/penyelenggaraan-pemerintahan-des/> diakses pada tanggal 26 Desember 2020 Pukul 20.00 WIB)  
<https://pramudyarum.wordpress.com/2013/02/09/penyelenggaraan-pemerintahan-des/> diakses pada tanggal 28 Desember 2020 Pukul 20.00 WIB  
<https://pramudyarum.wordpress.com/2013/02/09/penyelenggaraan-pemerintahan-des/> diakses pada tanggal 28 Desember 2020 Pukul 20.00 WIB  
<https://pramudyarum.wordpress.com/2013/02/09/penyelenggaraan-pemerintahan-des/> diakses pada tanggal 28 Desember 2020 Pukul 20.00 WIB

### 5. Wawancara

Yasir Arafat, Peratin (Kepala Desa), *Wawancara*, Pada tanggal 26 Desember 2020  
Arsip Pemilihan LHP  
Junaidi, Aparatur Pekon, *Wawancara*, Pada tanggal 26 Desember 2020  
Hendri Irwansyah, Aparatur Pekon, *Wawancara*, Pada tanggal 26 Desember 2020  
Abdul Rozak, Tokoh Adat, *Wawancara*, pada tanggal 26 Desember 2020  
M Syarkani, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 27 Desember 2020  
Rodian, Masyarakat, *Wawancara*, pada tanggal 27 Desember 2020  
Hazhori, Anggota LHP, *Wawancara* pada tanggal 27 Desember 2020  
Rohman, Anggota LHP, *Wawancara* pada tanggal 27 Desember 2020  
Tanwir, ketua pemilihan LHP, *Wawancara*, Pada tanggal 26 Desember 2020  
Ali Idris, Tokoh Adat, *Wawancara* pada tanggal 27 Desember 2020